

BAB II

LANDASAN TEORI & KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 yang digunakan untuk memahami nilai perusahaan dan tata kelola perusahaan adalah teori legitimasi. *Legitimacy theory* ini berfokus pada interaksi masyarakat dengan perusahaan. Legitimasi merupakan system pengelolaan yang berorientasi pada bias perusahaan pada individu/kelompok Masyarakat dan pemerintah individu (Utomo, 2019). Teori legitimasi berpendapat bahwa perusahaan harus terus berusaha untuk memastikan aktivitas perusahaan sesuai dengan norma, nilai dan kepercayaan yang ada pada masyarakat dan lingkungan setempat (Meutia, 2021). Perubahan ekspektasi sosial ini harus disesuaikan oleh perusahaan. Artinya ketika ekspektasi masyarakat tinggi terhadap suatu perusahaan, maka hal tersebut menandakan bahwa apa yang dilakukan perusahaan tersebut juga mengalami perubahan (Aviyanti *et al.*, 2022).

Pada penelitian ini masih banyak perusahaan yang belum membuat *ESG disclosure*. Namun seiringnya perkembangan zaman karena dengan adanya tuntutan maupun tekanan dari legitimasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini membuat perubahan peraturan bahwa laporan ini yang awalnya *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib) yang mana terjadi peningkatan 20% *sustainable report* dari tahun 2020 ke 2021 sehingga perusahaan perlu memberikan informasi mengenai laporan non-keuangan seperti *ESG disclosure* karena untuk

mempertahankan legitimasi organisasi. Selain itu, peran wanita sangat diperlukan di perusahaan sebagai posisi dewan direksi karena wanita dijadikan simbol isu kesetaraan untuk menanggapi tekanan publik, menjangkau berbagai pemangku kepentingan, dan mengamankan penerimaan masyarakat (Luo *et al.*, 2022). Maka dari itu, motivasi manajemen untuk mengungkapkan laporan non-keuangannya seperti *ESG disclosure* adalah untuk mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan. Dengan adanya koneksi politik pada perusahaan yang mana pemerintah akan menjadi regulator maka akan mengawasi jalannya operasional perusahaan sehingga perusahaan tersebut lebih cenderung untuk mematuhi aturan pemerintah. Keadaan tersebut akan memotivasi perusahaan untuk terus berupaya dalam memastikan bahwa aktivitas usahanya sesuai dengan norma, nilai dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Hal ini sering dibuktikan oleh perusahaan dengan menerbitkan laporan non-keuangan seperti *ESG disclosure* agar meningkatkan legitimasi perusahaan (Jurnali & Melissa, 2022).

2.1.2 ESG Disclosure

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*) menjunjung tinggi standar yang diakui agar dapat mengangkat ekonomi global dengan melakukan praktik perilaku perusahaan yang menyerukan lebih banyak kesadaran dan transparansi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Mohamed Buallay *et al.*, 2023). Kegiatan pengungkapan sosial dan lingkungan seperti *ESG disclosure* yang transparansi membuat para investor tertarik karena menjadi indikator jaminan terhadap kesalahan manajemen dan jaminan transparansi

perusahaan yang lebih tinggi dalam aktivitas keuangan dan non-keuangan (Aryssi *et al.*, 2020).

ESG adalah kegiatan perusahaan yang mencakup interaksi dengan lingkungan dan sosial, serta sistem pengendalian internal perusahaan dengan tujuan untuk meraih tujuan perusahaan dan memenuhi harapan para investor (Husada & Handayani, 2021). *ESG disclosure* merupakan evolusi terbaru dari pengungkapan sukarela dimulai pengungkapan *CSR* lalu pelaporan keberlanjutan. Skor *ESG* dapat menjadi alat instrument yang digunakan oleh para investor secara komprehensif untuk menilai kinerja keberlanjutan dalam suatu perusahaan (Roestanto *et al.*, 2022). Dengan melakukan pengukuran indikator kinerja *ESG* sesuai pedoman *GRI* yang menjadi tambahan informasi non-keuangan dapat digunakan sebagai indikator penting dalam mengevaluasi kinerja perusahaan selama kegiatan operasionalnya dan pengaruhnya terhadap ketiga aspek tersebut (Ghazali & Zulmaita, 2020)

Penerapan *ESG* yang pertama mengacu terhadap tindakan perusahaan mengenai lingkungan seperti pengurangan limbah dan polusi, emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Selanjutnya, konsep *social responsible* mirip dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berarti kegiatan bisnis yang bermanfaat bagi karyawan, lingkungan, dan masyarakat. Selain itu, *governance* (tata kelola) mengacu terhadap manajemen perusahaan untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat agar bisa mengoperasikan perusahaan dengan baik dalam jangka panjang (Ghazali & Zulmaita, 2020). Praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (*ESG*) perusahaan membentuk ukuran akuntabilitas baru yang mencerminkan komitmen sukarela terhadap tujuan non-keuangan dan dapat

menetapkan tujuan non-keuangan dalam kegiatan *ESG*. Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam melaporkan praktik *ESG* dinilai lebih mendapatkan keuntungan dari segi keuntungan strategis maupun keuangan perusahaan (Arayssi *et al.*, 2020).

2.1.3 Dewan Direksi Wanita

Keberadaan wanita yang semakin meningkat dalam memainkan peranan penting karena kondisi perekonomian yang terus berkembang sehingga persentase direksi wanita di dalam suatu perusahaan semakin meningkat (Liao *et al.*, 2019). Dewan direksi bertanggungjawab dalam penetapan agenda sosial perusahaan, mengalokasikan sumber daya perusahaan dan mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini agar membangun hubungan para pemangku kepentingan agar tetap stabil dan aman serta melakukan berbagai aktivitas sosial yang mendukung reputasi maupun profil perusahaan, sehingga perusahaan lebih mudah mendapatkan keuntungan dari dewan direksi yang terstruktur dengan baik (Husted & Sousa-Filho, 2019). Secara umum, peran dewan direksi dalam suatu perusahaan sebagai badan yang menetapkan kebijakan manajemen perusahaan dan mengambil keputusan atas masalah-masalah utama perusahaan (Naciti, 2019). Oleh karena itu, dewan direksi merupakan instrumen terpenting dalam tata kelola perusahaan karena dinilai akan menjadi bukti perusahaan telah melakukan tatakelola perusahaan yang baik. (Arayssi *et al.*, 2020).

Di antara karakteristik dewan yang berbeda, Salah satu permasalahan yang muncul dalam tata kelola perusahaan yaitu meningkatnya isu keberagaman *gender* yang menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, yang mana pada posisi kepemimpinan wanita dapat memberikan wawasan dan peningkatan hubungan

profesional yang lebih luas. Dimulai dengan keberadaan wanita dalam perusahaan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan usaha, namun juga memperhatikan isu-isu sosial seperti keberagaman *gender* dalam posisi manajemen serta tanggung jawab sosial terhadap kondisi sekitar (Matitaputty & Davianti, 2020). Hal ini didukung berdasarkan argumentasi para pemangku kepentingan direktur wanita lebih cenderung mendukung inisiatif dalam pengungkapan *ESG* dibanding direksi lelaki. Selain itu, dewan direksi wanita dianggap memiliki perbedaan persepsi peran kepemimpinan karenanya gaya kepemimpinan berbeda dengan direktusi laki-laki yang mana direksi wanita lebih partisipatif dan demokratis. Tak hanya itu, posisi wanita di direksi ditemukan lebih peduli tentang kesejahteraan orang lain dan lebih berorientasi pada pemangku kepentingan dibandingkan dengan direksi lelaki, yang dinilai cenderung lebih berorientasi pada pemegang saham. Direksi wanita juga lebih peka terhadap masalah sosial dan etika dan karena itu lebih condong pada isu-isu strategis yang memengaruhi pemangku kepentingan perusahaan dan CSR-nya (Wasiuzzaman & Wan Mohammad, 2020).

Dengan pengangkatan wanita sebagai wajah perusahaan akan mempengaruhi persepsi eksternal perusahaan secara positif sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Akibatnya mekanisme tatakelola perusahaan yang dilihat sebagai serangkaian tindakan akuntabilitas yang meningkatkan level legitimasi yang sesuai dengan harapan masyarakat (Manita *et al.*, 2018). Yang mana wanita telah mencapai kemajuan dengan menyamakan kedudukan di dewan. Dilihat semakin banyak wanita menjadi pemimpin sehingga semakin mampu membuktikan nilai mereka.

Meskipun kemajuan dalam menempatkan wanita di dewan direksi perusahaan berjalan lambat, namun jumlah mereka perlahan pasti meningkat di berbagai perusahaan. (Aryssi *et al.*, 2020)

2.1.4 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah salah satu indikator penting yang menggambarkan identitas suatu perusahaan. Menurut Pangaribuan (2018), Struktur kepemilikan adalah saham yang dimiliki individual maupun entitas yang memiliki hak dengan melakukan pemungutan suara dalam pembuatan keputusan perusahaan (Roestanto *et al.*, 2022). Struktur kepemilikan perusahaan ditandai dengan keragaman investor yang memiliki saham perusahaan. Struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi beberapa kategori antara lain kepemilikan asing dan kepemilikan institusional. Kategori investor yang berbeda mungkin memiliki motif yang berbeda, tetapi pada umumnya mereka mengharapkan perusahaan memberikan hasil atau kinerja yang baik, baik secara ekonomi maupun sosial, yang tidak merugikan atau membahayakan kehidupan masyarakat (Agustina & Lestari, 2022).

2.1.4.1 Kepemilikan Institusional

Perekonomian yang sering mengalami transisi maka pemerintah harus memilih keseimbangan antara tujuan politik dan tujuan ekonomi dalam memantau investor institusi guna meningkatkan pasar modal. Secara khusus, pemerintah berharap untuk mempertahankan pasar modal pasar saham yang tinggi dengan bantuan investor institusi, sehingga dalam beberapa kasus pemerintah harus melonggarkan pengawasan terhadap investor institusi. Hal ini membuat kendala

kebijakan yang dihadapi investor institusi berbeda (Yang *et al.*, 2023). Selain itu dengan kehadiran kepemilikan institusional dapat memunculkan komponen mekanisme tata kelola yang baik dan kuat guna untuk mengawasi manajemen perusahaan dapat dapat digunakan untuk menyesuaikan kepentingan manajemen dengan para investor baik domestic maupun luar negeri melalui investor institusional yang akan mendorong para CEO bertindak menyusun *action plan* sesuai dengan kemauan *shareholders* (Suteja, 2020).

Menurut Barock (2016) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga pada suatu perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memonitori segala tindakan manajemen yang merugikan perusahaan sehingga dengan kehadiran investor institusional akan terjadi peningkatan yang optimal pada pengawasan manajemen perusahaan (Roestanto *et al.*, 2022). Maka dari itu, kegiatan memonitori dinilai akan memperketat pengawasan demi membatasi perilaku menyimpang dan merugikan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Anisah & Hartono, 2022).

Kepemilikan institusional mempunyai peran penting untuk meminimalisir konflik antara manajer dan pemegang saham serta menjadi kekuatan bagi pihak eksternal. Kehadiran investor institusi dianggap sebagai mekanisme kontrol yang efektif dalam seluruh keputusan manajer. (Nofsinger *et al.*, 2019). Hal ini dikarenakan investor institusi terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan melakukan pengawasan untuk memenuhi kepentingan masyarakat seperti mewajibkan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sehingga perusahaan melakukan pengungkapan informasi non-

keuangan dalam kegiatan sosialnya. Dengan kehadiran kepemilikan institusional akan mengatasi tindakan manajemen yang menyimpang karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih efektif pada kinerja manajemen perusahaan (Agustina & Lestari, 2022).

2.1.4.2 Kepemilikan Asing

Kehadiran investor dengan berbagai kategori mungkin memiliki motivasi yang berbeda-beda, namun pada umumnya mereka mengharapkan perusahaannya memiliki kinerja yang baik, baik dari segi keuangan maupun aspek sosial yang tidak merugikan atau membahayakan kehidupan masyarakat (Agustina & Lestari, 2022). Salah satunya yaitu kepemilikan asing merupakan pilar terpenting dalam pencapaian transparansi dan kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Menurut Sugosha (2020) Kepemilikan asing adalah persentase dalam *annual report* yang tercatat di BEI, jika investor asing pada suatu perusahaan sama dengan jumlah modal yang dimilikinya, hal itu karena keuntungan yang dihasilkan perusahaan sangat positif. Kepemilikan asing merupakan salah satu faktor pendukung utama tata kelola perusahaan, sehingga kepemilikan asing akan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar modal (Wardana & Susanti, 2022).

Persentase kepemilikan asing yang tinggi umumnya dikaitkan dengan kuatnya pengaruh praktik asing (Abu Qa'dan & Suwaidan, 2019). Investor asing bisa menjadi alternatif ketika perusahaan ingin mengawasi manajemen karena perusahaan asing cenderung fokus pada tata kelola perusahaan yang baik, sehingga pilihan yang tepat jika perusahaan ingin meningkatkan transparansi dalam aspek ini

(Sandri *et al.*, 2021). Hal ini didukung karena kepemilikan asing dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan memaksimalkan nilai pemegang saham dengan mendorong pengungkapan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Dikarenakan berbagai tekanan dari investor asing mendorong praktik tata kelola perusahaan, dan memaksimalkan nilai pemangku kepentingan dengan mengungkapkan informasi non-keuangan, salah satunya terkait *ESG disclosure* (Fuadah *et al.*, 2022). Oleh karena itu, dengan adanya kehadiran investor asing juga dianggap dapat memaksimalkan aspirasi pemangku kepentingan (Al Amosh & Khatib, 2022).

Investor asing dianggap lebih mengenal praktik keberlanjutan karena cenderung mempunyai nilai-nilai yang berbeda dan wawasan yang luas karena paparan pasar global hal ini dapat membantu dalam menetapkan standar etika yang tinggi dan norma. Pengetahuan yang dimiliki oleh investor asing dapat membantu mengembangkan hubungan dengan perusahaan dari negaranya berasal sehingga dapat mempercepat dalam mengadopsi inovasi lingkungan baru dari luar negeri kedalam perusahaan di negara berkembang dan juga kemungkinan besar akan mendorong perusahaan untuk melakukan lebih banyak mengungkapkan indikator pada laporan non keuangan seperti *ESG disclosure* (Abu Qa'dan & Suwaidan, 2019). Selain itu, perusahaan yang memiliki banyak investor asing akan diberi penilaian yang lebih tinggi dan jarang menghadapi masalah penipuan. Maka dari itu, dengan adanya kepemilikan asing dapat memperkuat kualitas dalam pengungkapan laporan non keuangan, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat (Garanina & Aray, 2021).

2.1.5 Koneksi Politik

Koneksi politik sering terjadi di negara berkembang, di mana keterkaitan dengan politik terjalin dengan menempatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah sedemikian rupa sehingga pemerintah terikat dengan struktur organisasi, badan hukum, baik dalam pengurus maupun direksi. (Fajri, 2019). Koneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah kepala pemerintah pusat maupun badan yang bermitra seperti kepala daerah, BUMN, BUMD, partai politik dan jabatan lainnya yang berkaitan dengan pemerintah. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat keakraban hubungan perusahaan dengan pemerintahan (Juwono & Mayangsari, 2022).

Perusahaan yang melakukan koneksi politik dinilai memiliki hubungan istimewa dengan pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya perusahaan memiliki hubungan kedekatan terhadap politisi atau pejabat pemerintah dapat membantu perusahaan mendapatkan lebih sedikit pengawasan. Hasil studi menunjukkan bahwa kehadiran anggota dewan perusahaan yang terhubung secara politik akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial, hal ini dikarenakan koneksi politik dinilai sebagai sumber daya perusahaan yang sangat penting sehingga menyebabkan perusahaan melalaikan dalam pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang mana manajer lebih sering menghabiskan banyak biaya untuk kegiatan *rent-seeking* untuk memonopoli agar memperoleh ketersediaan berbagai sumber daya penting agar mencapai kontrak implisit dengan pemerintah (Luo *et al.*, 2022).

Meskipun masyarakat sering menilai bahwa koneksi politik memberikan dampak negatif, namun nyatanya pemerintah akan mendorong perusahaan agar menerbitkan *sustainability report*. Dikarenakan peran pemerintah sebagai regulator sehingga akan lebih mengawasi demikian perusahaan tersebut akan cenderung mematuhi aturan pemerintah. Hal itu akan memotivasi perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional usahanya sesuai dengan norma dan nilai di masyarakat dan lingkungan yang dibuktikannya dengan perusahaan mengeluarkan laporan non-keuangan seperti *ESG disclosure* (Jurnali & Melissa, 2022). Selain itu, perusahaan yang terafiliasi pemerintah akan menjamin perlindungan investor dan ketidakstabilan kondisi politik di suatu negara dan juga dapat membantu perusahaan mendapatkan sumber daya pemerintah (Luo *et al.*, 2022).

2.2 Landasan Empiris

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun/Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mahmoud Arayssi, Mohammad Jizi, dan Hala Hussein Tabaja (2019) <i>The impact of board composition on the level of ESG disclosures in GCC countries</i>	V. Independen: 1. Independensi Dewan 2. <i>Women on Board</i> 3. Dualitas CEO V. Dependen: <i>ESG Score</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (-)$
2	Nicola Cucari, Salvatore Esposito De Falco dan Beatrice Orlando (2018) <i>Diversity of Board of Directors and Environmental Social Governance: Evidence from Italian Listed Companies</i>	V. Independen: 1. <i>Women on board</i> 2. <i>CSR Committee</i> 3. <i>Age Board</i> 4. <i>Independent Director</i> V. Dependen: <i>ESG Dislosure</i>	Hasil Penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (-)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (-)$ 4. $X4 \rightarrow Y (+)$

No	Penulis/ Tahun/Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Bryan W. Husted dan José Milton de Sousa-Filho (2018) <i>Board structure and environmental, social, and governance disclosure in Latin America</i>	V. Independen: 1. <i>Board Size</i> 2. <i>Women on board</i> 3. <i>CEO Duality</i> 4. <i>Independent Directors</i> V. Dependen: <i>ESG Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (-)$ 3. $X3 \rightarrow Y (-)$ 4. $X4 \rightarrow Y (+)$
4	Thi Hong Van Hoang, Wojciech Przychodzen, Justyna P, dan Elys'e A. Segbotangni (2021) <i>Environmental transparency and performance: Does the corporate governance matter?</i>	V. Independen: 1. <i>Board Size</i> 2. <i>CEO Duality</i> 3. <i>Gender Diversity</i> 4. <i>Board Member Age</i> V. Dependen: <i>Environmental Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (+)$ 4. $X4 \rightarrow Y (+)$
5	Shaista Wasiuzzaman dan Wan Masliza Wan Mohammad (2020) <i>Board gender diversity and transparency of environmental, social and governance disclosure: Evidence from Malaysia</i>	V. Independen: <i>Women on Board</i> V. Dependen: <i>ESG Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah: $X \rightarrow Y (+)$
6	Valeria Naciti (2019) <i>Corporate governance and board of directors: The effect of a board composition on firm sustainability performance</i>	V. Independen: 1. <i>Independent director</i> 2. <i>Board diversity</i> 3. <i>CEO Duality</i> V. Dependen: <i>Sustainable Performance</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (+)$
7	Jean Stevany Matitaputty dan Arthik Davianti (2020) <i>Does broad gender diversity affect corporate social responsibility disclosures?</i>	V. Independen: <i>Gender Diversity</i> V. Dependen: <i>CSR Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah: $X \rightarrow Y (+)$
8	Yu Wang, Jie Ma dan Tienan Wang (2021) <i>Do all female directors have the same impact on corporate social</i>	V. Independen: <i>Female director</i> V. Dependen: <i>CSR Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah: $X \rightarrow Y (+)$

No	Penulis/ Tahun/Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>responsibility? The role of their political connection</i>		
9	Zhongju Liao, Manting Zhang, dan Xiaopeng Wang (2019) <i>Do female directors influence firms environmental innovation?</i>	V. Independen: 1. <i>Female director</i> 2. <i>Female independent director</i> 3. <i>Female Chairperson</i> V. Dependen: <i>Environmental Innovation</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (-)$
10	Hamzeh Al Amosh dan Saleh F.A. Khatib (2021) <i>Ownership structure and environmental, social and governance performance disclosure: the moderating role of the board independence</i>	V. Independen: 1. <i>Foreign own</i> 2. <i>State own</i> 3. <i>Managerial own</i> 4. <i>Blackholder own</i> 5. <i>Family own</i> V. Dependen: <i>ESG Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (-)$ 4. $X4 \rightarrow Y (-)$ 5. $X5 \rightarrow Y (+)$
11	Luk Fuadah, M Mukhtaruddin, Isni Andriana dan Anton Arisman (2022) <i>The Ownership Structure, and the Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure, Firm Value and Firm Performance</i>	V. Independen: 1. <i>Foreign Own</i> 2. <i>Public Own</i> 3. <i>State Own</i> 4. <i>Family Own</i> V. Dependen: <i>ESG Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (-)$ 4. $X4 \rightarrow Y (-)$
12	Mohammad Bassam Abu Qa'dan and Mishiel Said Suwaidan (2018) <i>Board composition, ownership structure and corporate social responsibility disclosure: the case of Jordan</i>	V. Independen: 1. <i>Board Size</i> 2. <i>Independent Direct</i> 3. <i>CEO Duality</i> 4. <i>Director Age</i> 5. <i>Director Gender</i> 6. <i>Board Own</i> 7. <i>Institutional Own</i> 8. <i>Foreign Own</i> V. Dependen: <i>CSR Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (-)$ 4. $X4 \rightarrow Y (-)$ 5. $X5 \rightarrow Y (+)$ 6. $X6 \rightarrow Y (-)$ 7. $X7 \rightarrow Y (-)$ 8. $X8 \rightarrow Y (+)$
13	Baochen Yang, Chunying Guo & Ying Fan (2023)	V. Independen: <i>Institutional Investor</i>	Hasil penelitian ini adalah:

No	Penulis/ Tahun/Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Institutional Investor Networks and ESG Performance: Evidence from China</i>	V. Dependen: ESG Performance	$X \rightarrow Y (-)$
14	Nur Anisah dan Ulil Hartono (2022) Pengaruh Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Perusahaan Sub-Sektor Tekstil Dan Garmen Di Bursa Efek Indonesia	V. Independen: 1. Kepemilikan Manajerial 2. Kepemilikan Institusi 3. Kepemilikan Asing V. Dependen: Kinerja perusahaan	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (-)$ 2. $X2 \rightarrow Y (-)$ 3. $X3 \rightarrow Y (-)$
15	Aurellia Bianda Sandri, Rida Prihatni dan Diah Armeliza (2021) Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Keluarga dan Tekanan Karyawan terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan	V. Independen: 1. Kepemilikan asing 2. Kepemilikan keluarga 3. Tekanan Karyawan V. Dependen Laporan keberlanjutan	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (-)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (+)$
16	Tatiana Garanina dan Yulia Aray (2021) <i>Enhancing CSR disclosure through foreign ownership, foreign board members, and cross-listing: Does it work in Russian context?</i>	V. Independen: 1. Foreign own 2. Foreign board members 3. Cross listing V. Dependen: CSR Disclosure	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (-)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (+)$
17	Ni Putu Tista Paradiva Yani dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2020) Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility	V. Independen: 1. Kepemilikan asing 2. Kepemilikan institusional 3. Leverage V. Dependen: CSR Disclosure	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (-)$
18	John R. Nofsinger, Johan Sulaeman, Abhishek Varma (2019)	V. Independen: <i>Institutional Investors</i> V. Dependen:	Hasil penelitian ini adalah: $X \rightarrow Y (+)$

No	Penulis/ Tahun/Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Institutional investors and corporate social responsibility</i>	CSR	
19	Anantya Roestanto, Alfa Vivianita, dan Nyayu Nurkomalasari (2022) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Jenis Industri dan Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure</i> (Studi Empiris Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di IDX 2017-2020)	V. Independen: 1. Ukuran Perusahaan 2. Umur Perusahaan 3. Jenis Industri, 4. Kepemilikan Institusional V. Dependen: <i>ESG Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (+)$ 4. $X4 \rightarrow Y (+)$
20	Xin Cheng, Helen Wang, dan Xianjue Wang <i>Common institutional ownership and corporate social responsibility</i>	V. Independen: <i>Institutional Own</i> V. Dependen: <i>CSR Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah $X \rightarrow Y (-)$
21	Dyah Agustina dan Henny Setyo Lestari <i>The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility Moderated Financial Performance of Food & Beverage Industry in Indonesia</i>	V. Independen: 1. <i>Institutional Own</i> 2. <i>Managerial Own</i> V. Dependen: <i>CSR Disclosure</i> V. Moderasi: Financial Performance	Hasil penelitian ini adalah 1. $X1 \rightarrow Y (-)$ 2. $X2 \rightarrow Y (-)$
22	Juwono Surono dan Sekar Mayangsari Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	V. Independen: 1. Koneksi Politik 2. Kepemilikan Keluarga 3. Ukuran Perusahaan V. Dependen: <i>CSR Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah 1. $X1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X3 \rightarrow Y (+)$
23	Teddy Jurnal (2022) Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Hubungan Direktur Wanita dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	V. Independen 1. Direktur Wanita 2. Koneksi Politik V. Dependen <i>CSR Disclosure</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X1 \rightarrow Y (-)$ 2. $X2 \rightarrow Y (+)$

No	Penulis/ Tahun/Judul	Variabel	Hasil Penelitian
24	Krammer, Sorin, Jimenez, dan Alfredo Exeter (2019) <i>Do political connection matter for firm innovation? Evidence from emerging markets in Central Asia and Eastern Europe</i>	V. Independen: <i>Political connection</i> V. Dependen <i>Firm Innovation</i>	Hasil penelitian ini adalah: $X \rightarrow Y (+)$
25	Richo Diana Aviyanti, Nik Amah, Dwi Nila Andriani, dan Pramesti Wahyu Widiastuti (2022) <i>The Effect of Corporate Governance, Political Connection, and Executive Power on Corporate Social Responsibility Performance</i>	V. Independen: 1. <i>GCG</i> 2. <i>Political connection</i> 3. <i>CEO Power</i> V. Dependen: <i>CSR</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X_1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X_2 \rightarrow Y (-)$ 3. $X_3 \rightarrow Y (+)$
26	Xiyang Luo, Ruimin Zhang dan Wei Liu (2022) <i>Environmental legitimacy pressure, political connection and impression management of carbon information disclosure</i>	V. Independen: 1. <i>Environmental legitimacy</i> 2. <i>Impression management</i> V. Dependen: <i>Carbon disclosure</i> V. Moderasi: <i>Political connection</i>	Hasil penelitian ini adalah: 1. $X_1 \rightarrow Y (+)$ 2. $X_2 \rightarrow Y (+)$ 3. $X_1 \rightarrow Y \rightarrow M (+)$ 4. $X_2 \rightarrow Y \rightarrow M (+)$

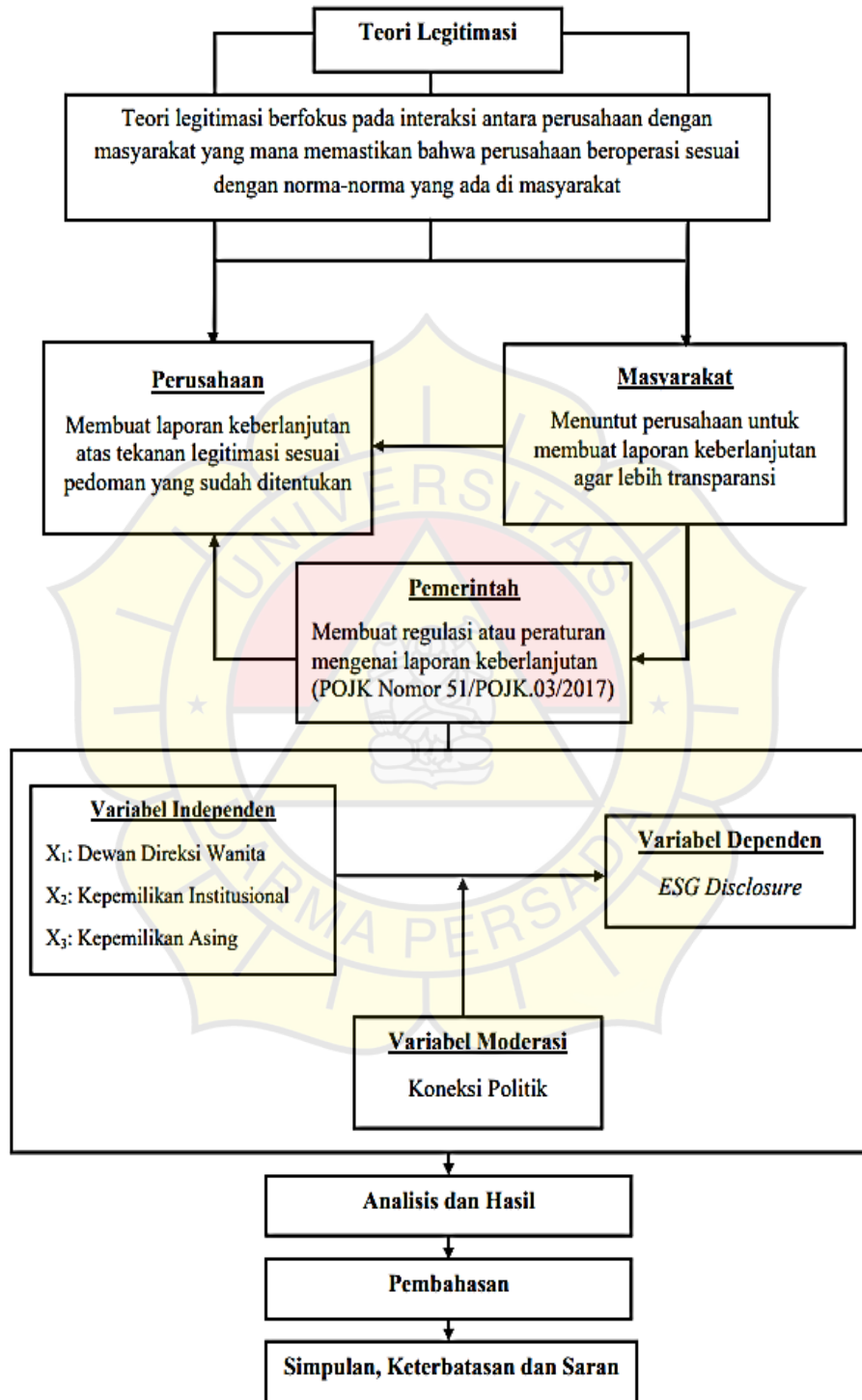
2.3 Kerangka Pemikiran & Model Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu dibutuhkan suatu kerangka penelitian dan model konseptual untuk memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

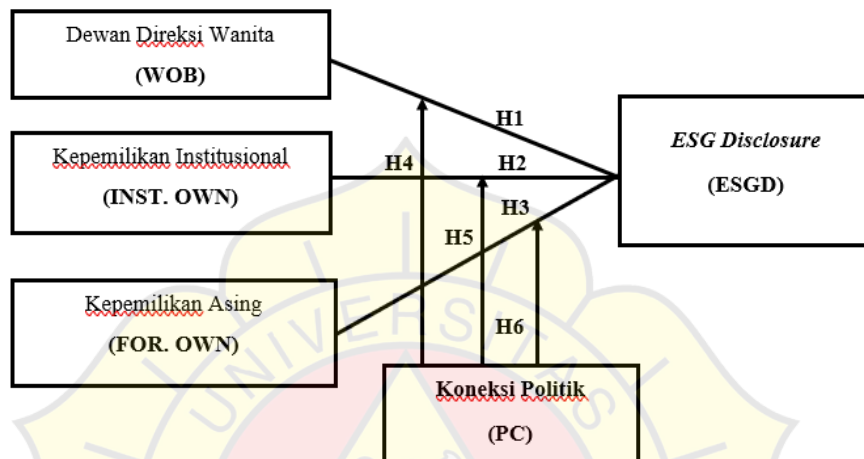


Sumber: Penulis (2024)

2.3.2 Model Konseptual

Model konseptual dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2. 2
Model Konseptual



Sumber: Penulis (2024)

Keterangan:

ESGD : Skor GRI 2021 Perusahaan i periode t.

WOB : Total dewan direksi wanita dibagi total keseluruhan dewan direksi perusahaan i periode t.

Inst. Own : Total saham yang dimiliki institusi dibagi dengan total saham yang beredar di perusahaan i periode t.

For. Own : Total saham yang dimiliki pihak asing dibagi total saham yang beredar di perusahaan i periode t.

PC : Dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan anggota dewan yang memiliki koneksi politik dan 0 jika lainnya.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas maka terdapat 6 (enam) hipotesis yaitu sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Dewan Direksi Wanita terhadap *ESG Disclosure*

Dewan direksi wanita dinilai berbeda dari rekan pria karena dalam hal gaya kepemimpinan, jalur karir dan memprioritaskan kebutuhan organisasi. Pengalaman dan minat wanita lebih memusat pada organisasi pelayanan, kesejahteraan masyarakat, dan filantropi, sedangkan lelaki hanya berfokus pada pencapaian *financial performance* (Arayssi *et al.*, 2020). Hasil analisis ini sejalan dengan Wasiuzzaman & Wan Mohammad (2020) juga mengungkapkan bahwa dewan direksi wanita berpengaruh positif terhadap *ESG disclosure* dikarenakan semakin tinggi jumlah proporsi dewan direksi wanita maka semakin tinggi *ESG disclosure* dilakukan, hal ini didukung bahwa wanita dianggap lebih nyaman dalam menangani masalah sosial sehingga dinilai dapat meningkatkan kinerja sosial. Oleh karena itu, peneliti mendukung gagasan bahwa dengan keberadaan wanita akan meningkatkan pengungkapan *ESG* karena adanya penekanan pada peningkatan partisipasi wanita dalam jajaran dewan pada suatu perusahaan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Naciti (2019) mengungkapkan bahwa dewan direksi wanita berpengaruh positif dalam pengungkapan *ESG* dikarenakan penalaran wanita berbeda dengan laki-laki yang mana wanita lebih cenderung menggunakan penalaran sosial sehingga mampu menjalin hubungan yang baik dan menanggapi kebutuhan orang lain. Selain itu, perusahaan yang

memiliki tiga atau lebih direksi wanita dinilai memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap isu lingkungan, ketidaksetaraan *gender* dalam organisasi yang dianggap sebagai faktor negatif sehingga menyebabkan komunikasi yang buruk, konflik yang lebih besar, dan kurangnya kerjasama. Maka dari itu, dengan adanya wanita dalam posisi direksi yang dinilai sebagai kelompok homogen sehingga menciptakan jaringan komunikasi yang lancar dan kemudahan dalam menyampaikan pendapat.

Analisis tersebut berbeda dengan hasil analisis penelitian Cucari *et al* (2018) menyatakan bahwa dewan direksi wanita berpengaruh negatif dalam pengungkapan *ESG* dikarenakan semakin tinggi proporsi jumlah dewan direksi wanita maka semakin rendah *ESG disclosure* dilakukan, hal ini didukung bahwa kondisi kehadiran wanita di dewan lebih didorong oleh tekanan regulasi karena tidak sesuai dengan keahlian maka kinerja perusahaan cenderung menurun maka dari itu perusahaan akan berusaha menyembunyikan penurunan kinerja tersebut sehingga terjadi penurunan dalam *ESG disclosure*. Berdasarkan hasil penjabaran penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Dewan direksi wanita berpengaruh positif terhadap *ESG disclosure*.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *ESG Disclosure*

Investor institusional sebagai individu yang independen, menganalisis kepemilikan saham dan peran masing-masing berbagai jenis investor institusional dalam tata kelola perusahaan. Kepemilikan saham institusi dinilai lebih mengutamakan strategi jangka pendek dan mengabaikan manfaat jangka panjang dari kinerja kegiatan *ESG* seperti manfaat ekonomi dan keuangan yang lebih besar,

nilai pasar, reputasi perusahaan dan lain-lain. Selain itu, berdampak pada terbatasnya penguasaan kepemilikan saham, sehingga tidak dapat berperan aktif dalam mendorong kinerja lingkungan dan mempengaruhi pemangku kepentingan terkait masalah lingkungan (Yang *et al.*, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan Agustina & Lestari (2022) mengungkapkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *CSR* dikarenakan semakin tinggi kepemilikan institusional dinilai maka semakin rendah pengungkapan *CSR*. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menekan manajemen untuk tidak fokus hanya pada kegiatan sosial dan berorientasi terhadap keuntungan dan keinginan kepemilikan institusional ini ternyata dimanfaatkan oleh manajemen untuk berperilaku oportunistik karena investor institusional akan cenderung mendesak manajemen perusahaan untuk mengurangi biaya-biaya seperti *CSR* sehingga kegiatan sosial dipandang sebagai kegiatan yang kurang baik karena pemborosan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Cheng *et al* (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *ESG disclosure* dikarenakan semakin tinggi jumlah proporsi investor institusional maka semakin rendah pengungkapan *CSR* dilakukan. Artinya, investor institusional memberikan pandangan bahwa seharusnya perusahaan hanya melakukan dalam memaksimalkan nilai pemegang saham dibanding dengan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, terjadinya penurunan kesadaran perusahaan dalam mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Analisis tersebut bertolak belakang dengan Roestanto *et al* (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *ESG disclosure* dikarenakan semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi perusahaan melakukan *ESG disclosure*, hal ini terjadi karena berbagi kepemilikan oleh institusi dinilai dapat mengendalikan perusahaan dan mempunyai kekuasaan yang cukup kuat bagi pihak eksternal untuk mengurangi terjadinya konflik. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah lembaga mewajibkan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang mana presentase kepemilikan yang tinggi menyebabkan investor institusional memiliki kekuasaan dengan memonitori praktik pengungkapan perusahaan sehingga semakin tinggi *voluntary disclosure* seperti *ESG* diungkapkan. Berdasarkan hasil penjabaran penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *ESG disclosure*.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *ESG Disclosure*

Pemegang saham asing merupakan salah satu pilar terpenting dalam mencapai transparansi dan kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya investor asing juga dapat meningkatkan aspirasi *stakeholder* ini memberi legitimasi pada aktivitas perusahaan (Al Amosh & Khatib, 2022). Sehingga kepemilikan asing dianggap paling *concern* terhadap pengungkapan mengenai sosial dan lingkungan, hal ini disebabkan karena investor asing memiliki tingkat pengawasan manajemen yang tinggi dalam memonitori perusahaan untuk melakukan kegiatan/aktivitas sosial (Yani & Suputra, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Fuadah *et al* (2022) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ESG* dikarenakan semakin banyak jumlah investor asing maka semakin tinggi *ESG disclosure*. Hal ini didukung dengan adanya kehadiran pemegang saham asing umumnya menuntut standar tinggi dalam hal pengungkapan informasi, keahlian manajerial dan teknis sehingga peningkatan tata kelola perusahaan dan memaksimalkan nilai pemangku kepentingan dengan menekankan perusahaan agar mengungkapkan informasi non-keuangan seperti pengungkapan *ESG* yang dapat meningkatkan legitimasi perusahaan tersebut.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Al Amosh & Khatib (2022) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *ESG disclosure* dikarenakan dengan keahlian investor asing dapat mengarahkan kebijakan perusahaan menuju agenda tertentu seperti keberlanjutan. Maka dari itu, dengan adanya investor asing dapat memotivasi perusahaan dalam melaporkan informasi *ESG* sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak sehingga dapat meningkatkan sistem akuntabilitas perusahaan dan transparansi dalam pengungkapan laporan *ESG* yang mana perusahaan dapat meningkatkan atau mempertahankan legitimasi dalam perusahaan tersebut.

Penelitian tersebut berbeda dengan Abu Qa'dan & Suwaidan (2019) menyatakan kepemilikan asing berpengaruh negatif kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Yordania dikarenakan semakin tinggi persentase kepemilikan asing maka semakin rendah pengungkapan pertanggungjawaban sosial, hal ini didukung terdapat tingkat konsentrasi

kepemilikan yang lebih tinggi sehingga terjadi asimetri informasi dengan demikian mengurangi kebutuhan akan lebih banyak pengungkapan. Berdasarkan hasil penjabaran penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *ESG disclosure*.

2.4.4 Pengaruh Dewan Direksi Wanita terhadap *ESG Disclosure* dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi

Dengan perusahaan melakukan *ESG disclosure* dianggap dapat mengurangi informasi yang asimetris pada manajemen dan pemegang saham sehingga pemegang saham dapat membantu dalam menghadapi permasalahan dalam pengambilan keputusan yang dikendalikan dan disetujui oleh dewan direksi (Dicko *et al.*, 2020). Keragaman *gender* dewan direksi merupakan faktor vital dalam tata kelola perusahaan yang dinilai bahwa wanita merupakan *risk taker* dibandingkan laki-laki. Menurut Menurut Chong *et al* (2018) sensitivitas dewan terhadap inisiatif pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih tinggi jika ada lebih banyak wanita di jajaran dewan, di mana direktur wanita diharapkan dapat membuat perspektif yang dapat membantu mengatasi masalah tanggung jawab sosial perusahaan serta memiliki keterampilan bertahan hidup yang lebih baik dan manajer wanita berperilaku lebih rasional dibandingkan manajer pria (Jurnali & Melissa, 2022).

Hal ini didukung oleh Wang *et al* (2021) dan Ali *et al* (2022) menyatakan bahwa dewan direksi wanita yang mempunyai koneksi politik memiliki orientasi sosial lebih kuat daripada tidak terhubung secara politik yang mana tujuan utama pemerintah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dan stabilitas.

Ideologi semacam itu cenderung menembus ke dalam orientasi nilai individu, membuat orang yang terhubung secara politik sangat berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dewan direksi wanita yang terhubung secara politik cenderung lebih peduli terhadap masalah sosial dan berbagai pemangku kepentingan seperti komunitas lokal, lingkungan, karyawan, dan pelanggan sehingga semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial akan lebih diungkapkan dan juga dengan adanya perusahaan yang memiliki kaitannya dengan politik manfaatnya perusahaan akan mendapatkan informasi secara langsung mengenai UU ataupun peraturan dibawahnya yang dibuat pemerintah bersama anggota dewan direksi perusahaan yang mana kondisi perusahaan akan stabil dan kondusif karena mendapatkan perlindungan politik. Berdasarkan hasil penjabaran penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H4: Koneksi politik memoderasi pengaruh dewan direksi wanita terhadap *ESG disclosure*.

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *ESG Disclosure* dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi

Peran pemerintah sangat kuat di negara berkembang dan tekanan itu berdampak sangat signifikan terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan seperti *ESG disclosure* (Saraswati et al., 2020). Kepemilikan institusional mempunyai fungsi dalam pemantauan tata kelola perusahaan, sehingga investor institusional cenderung mendorong kinerja manajemen perusahaan yang lebih optimal. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keterikatan perusahaan dengan pemerintahan atau politisi dapat menimbulkan tantangan yang

signifikan (Krammer & Jiménez, 2020). Bahwa perusahaan yang terafiliasi dengan politik akan menggunakan koneksinya untuk mendapatkan keuntungan yang tersedia di pasar. Hal ini dikarenakan para investor institusional menganggap perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintah akan mendapatkan perlakuan yang istimewa dari para pemerhati ekonomi dengan adanya tanda-tanda perlakuan khusus dari pemerintah yang mana sejalan dengan peran investor institusional yang cenderung melakukan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan tempat mereka berinvestasi sehingga mereka cenderung lebih memutuskan aliran pendapatan yang telah diprediksi oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik di dalamnya (Kusumaningrum & Nahda, 2022).

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Hidayati & Diyanty, (2018) dan Kusumaningrum & Nahda (2022) yang menyatakan bahwa investor institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar guna mengurangi tindakan manajer yang menyimpang sehingga sumber informasi lebih mudah diketahui. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang tinggi dapat membuat perusahaan yang memiliki politik akan meningkatkan *ESG disclosure* karena peran pemerintah akan memaksa perusahaan untuk menerbitkan *sustainable report*. Selain itu, perusahaan yang mempunyai hubungan politik dianggap lebih mungkin mencapai kinerja yang lebih baik melalui komitmen tanggung jawab sosial mereka, karena mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik dalam menentukan permasalahan. keunggulan sosial dan pemahaman tentang ekspektasi politik, berkontribusi pada peningkatan legitimasi sosial-politik dibanding perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik yang mana hal tersebut sejalan dengan pandangan investor institusi,

karena investor institusional dapat mengontrol kebijakan yang diambil manajemen perusahaan agar searah dengan kepentingannya dan keinginan Pemerintah untuk mendorong perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report* sehingga pengungkapan tersebut dianggap menjadi cara terbaik untuk mendapat legitimasi di masyarakat. Berdasarkan hasil penjabaran penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Koneksi politik memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *ESG disclosure*.

2.4.6 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *ESG Disclosure* dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi

Keterkaitan perusahaan dengan politisi menunjukkan hubungan jangka panjang yang dianggap sebagai sumber daya strategis yang membantu mempromosikan, menetralsir atau bahkan mengelola faktor eksternal yang mempengaruhi investasi mereka. Perusahaan juga menggunakan dana sebagai dukungan terhadap kandidat politik agar mendapatkan akses untuk mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan bila diperlukan. Salah satunya kebijakan mengenai investor asing (Bianchi et al., 2019). Dengan kehadiran investor asing akan memotivasi perusahaan untuk membuat pengungkapan keberlanjutan yang mana perusahaan dan pemangku kepentingan akan lebih mendapatkan kepercayaan apabila terdapat kehadiran pemegang saham asing dan memotivasi perusahaan untuk melakukan laporan keberlanjutan sehingga meningkatkan transparansi mengenai perusahaan tersebut (Al Amosh & Khatib, 2022). Perusahaan menjadikan investor asing sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan aliran modal masuk sehingga dapat memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Namun, investor

asing dianggap sangat sensitif terhadap isu-isu mengenai kestabilan hukum dan politik sehingga tidak mau mengambil risiko tinggi yang mempengaruhi kegiatan investasinya. Maka dari itu, investor asing akan lebih menanamkan modalnya apabila perusahaan terkoneksi dengan politisi (Agustian, 2021).

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Agustian (2021), Dicko *et al* (2020), dan Bianchi *et al* (2019) menunjukkan bahwa investor asing akan menanamkan modalnya apabila perusahaan terdapat afiliasi pada politisi karena dengan adanya koneksi politik akan mampu mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat sesuai dengan pemegang kekuasaan sehingga akan mendapatkan kemudahan mengenai pembiayaan maupun kebijakan dalam peningkatan kinerja keuangan maupun non keuangan seperti *ESG disclosure*. Selain itu, perusahaan yang mempunyai koneksi politik dengan politisi atau pemerintah akan cenderung menekankan perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan karena akan meringankan pemerintah sebagai regulator, hal ini sejalan dengan tujuan investor asing yang umumnya menuntut standar tinggi dalam hal pengungkapan informasi, keahlian manajerial dan teknis sehingga akan berusaha untuk meningkatkan legitimasi perusahaan, yang akan berdampak pada keberlanjutan. Berdasarkan hasil penjabaran penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₆: Koneksi politik memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *ESG disclosure*.